BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum PT BIB dengan PT SP dan AJB Bumiputera berlandaskan pada perjanjian yang dibuat para pihak, berupa Perjanjian Kerja Sama antara PT SP dengan AJB Bumiputera sebagaimana terakhir dilakukan Addendum II pada tanggal 15 April 2010 dengan menambahkan PT BIB menjadi para pihak dalam perjanjian sebagai Pialang asuransi yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan PT SP selaku Pemegang polis asuransi.
2. Wanprestasi pembayaran klaim asuransi yang terjadi pada AJB Bumiputera disebabkan oleh kondisi kesulitan keuangan berdasarkan Laporan Penyehatan Keuangan dari OJK dan tata kelola perusahaan yang kurang optimal dan diperburuk dengan AJB Bumiputera yang belum memiliki dan belum membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi guna mengevaluasi tata kelola perusahaan secara terintegrasi.
3. PT BIB selaku Pialang asuransi PT SP memiliki tanggung jawab yang dinyatakan dalam perjanjian, yang mana PT BIB telah menunaikan sebagian prestasi tersebut, yakni telah melakukan evaluasi penawaran biaya tambahan premi sekaligus penyesuaian gaji dasar asuransi, menunjuk perusahaan asuransi, memberikan premi yang lebih kompetitif, dan telah melakukan penilaian atas perhitungan dan kecukupan dana pengelolaan program asuransi. Namun, belum menyanggupi pelaksanaan prestasi untuk membantu pelayanan klaim asuransi demi kepentingan PT SP.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah di atas terdapat beberapa saran, sebagai berikut:

1. Asuransi memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian suatu negara, AJB Bumiputera selaku perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan telah mengalami keadaan gagal bayar kepada para pemegang polisnya sehingga menimbulkan banyak kerugian dan belum kunjung membaik kondisi kesehatan keuangan perusahaan, seharusnya OJK melakukan pemberian sanksi administratif, salah satunya program pembekuan izin menerbitkan polis asuransi kepada AJB Bumiputera sampai mampu mencapai tingkat kesehatan keuangan yang cukup atau bahkan mencabut izin usaha dan mempailitkan perusahaan tersebut apabila tidak berisiko berdampak sistemik.
2. Pialang asuransi sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa wajib menjaga tanggung jawab moral dan hukum dari segala tindakan yang diambilnya. PT BIB sepatutnya membantu PT SP memperoleh haknya atas polis asuransi, yakni menuntut pelunasan pembayaran klaim kepada AJB Bumiputera dan menuntut ganti rugi atas dampak dari wanprestasi serta melakukan upaya hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi atau tindakan patut lainnya guna melindungi hak PT SP sebagai pemegang polis.